

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar Munir. 2002. Siti Hajar Mohd Yasin, Privacy & Data Protection. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83
- Agus Suwandono, 2016, “Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Vol. 21 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran,
- Alexandra Dobra, Rawls’ two principles of justice: their adoption by rational self-interested individuals, E-LOGOS 17(1): June 2010, 1-7
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal. 11
- Arikunto, Suharsini, 2010. Prosedur Penelitian, Rineka cipta Jakarta
- Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS), Legislatif, Vol. 3 No.2, Hal.167-190
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007,
- Banisar, 2000, Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws and Developments. Washington. D.C: Electronic Privacy Information Centre.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien) Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 239
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta: hlm 27.
- Cynthia, H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hal 191 – 204

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385
- Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h1m. 210
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 286
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
- Dorraji, Seyed Ebrahim; Barcys."Privacy in Digital Age: Dead or Alive?! Regarding the New EU Data Protection Regulations" (Lithuania: Mykolas Romeris University. 2014);
- Dwi Ayu Astrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime," Lex Privatum, Vol.III/No. 1/JanMar/2015, 152.
- Ernama Santi,dkk. " Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Fintech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016) " Diponegoro Law Journal : Vo1 6 No. 3 2017. H1m 6
- Ernama Santi,dkk. " Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Fintech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016) " Diponegoro Law Journal : Vo1 6 No. 3 2017. H1m 6
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fintech (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Op.Cit., h1m. 10
- Gita Andini, "Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending," Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017, h1m. 51
- Halimawan, Aditya, dkk. Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, (Jogjakarta: Dewan Mahasiswa Justicia Universitas Gajah Mada dan Constitutional Law Society, 2020
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by: Anders Wedberg. Russe11 & Russe11, New York, 1961, h1m. 5-6

- Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. VI, Kencana, Jakarta, hlm 72
- I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi *Online*," Kerta Semaya Vol. 4, no. 4 (2016) hlm. 3.
- Jerry Kang, 1998, Information Privacy in Cyberspace Transaction, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, h. 5
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 18
- Kasmir, 2014, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80-81
- L..J. Van Apeldoorn, , 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita: hal 11-12
- Lambert, Paul. Understanding The New European Data Protection Rules. (Boca Raton: CRC Press. 2017)
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju,. Mi11ard
- M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat diIndonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hal 3.
- Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), h 18.
- Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*," Jurnal Justitia Hukum 1, no. 2 (2017) hlm. 192
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung; Hal 6
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta hal 14.

Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi (2020) Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik, Jurnal Ham Volume 11, No. 2, Agustus 2020

Nurmantari, Ni Nyoman dkk () Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman *Online*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 8, n. 12, p. 1-14, nov. 2019. ISSN 2303-0550.

OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, "Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech", Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan,

JakartaPan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No. 1 April 2009, Jakarta, 2009, hlm. 139-140

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television / IPTV Pasal 24 ayat (c)

Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik pasal 12.

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 6

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 7

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 47

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010

Phillipus M. Hadjon, "Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal.2

Rawls, J. (2000). A Theory of Justice. Choice Reviews Online, 37(07), 37-4151-37-4151. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.37-4151>

- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.23.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): 88–100.
- Satijpto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53
- Shidarta, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Penerbit Grasindo, hal.58
- Simorangkir, 2000, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.102
- Sinta Dewi, 2016, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hal.25
- Sinta Dewi. 2015. “Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia”. Jurnal De Jure, Vo1. 15 No. 2, Juni 2015
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal.1
- Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta : Liberty, 2008), halaman 2 dan 3.
- Surat Edaran dari KOMINFO No. 3 Tahun 2016 terkait Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Seojk.07/2014 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Rajawali Pres, Depok, 2018, 212-216.

- Syaifudin. A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Fintech Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, *Dinamika*, Vol.26 No.4, Hal.408-421
- Theo Huijbers 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta Kanisius; hal. 16-17
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196
- Tim Privacy Internasional dan ELSAM. *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005) hlm. 32
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 26 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (14).
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3)
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45
- Voice, Paul (2011). *Rawls explained: from fairness to utopia*. Open Court. pp. 41–48.
- Yassir Arafat. 2015. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember*. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.
- Zaeni Asyhadi, 2016, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Website :

<https://app.cnnindonesia.com/aplikasi-fintech-ilegal-ini-membangun-user-based-mereka-berdasarkan-data-yang-bocor-dan-beredar-di-dark-web-diakses-pada-tanggal-11-november-2021>

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal-diakses-pada-tanggal-11-november-2021>

<https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/609a43a46aa5e/pencurian-data-pribadi-dalam-pusaran-bisnis-fintech-ilegal> diakses pada tanggal 10 November 2021

<https://tirto.id/nelangsa-korban-pinjol-akar-masalah-yang-bikin-petaka-berulang-gkxE> diakses pada tanggal 11 November 2021

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585> diakses pada tanggal 11 November 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210505154932-37-243444/wah-pinjaman-orang-indonesia-ke-pinjol-tembus-rp-18167-t> diakses pada tanggal 11 November 2021

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210820124847-185-682957/pengguna-pinjol-naik-kominfo-berupaya-lindungi-data-pribadi> diakses pada tanggal 11 November 2021

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita> diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37541/ini-upaya-pemerintah-lindungi-masyarakat-dari-pinjaman-online-ilegal/0/berita> diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<https://www.liputan6.com/teknologi/read/4636598/strategi-pemerintah-berantas-pinjol-ilegal> diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx> diakses pada tanggal 4 Desember 2021